

# Mewujudkan Kewarganegaraan Ekologis melalui Pendidikan Politik Partai Hijau Indonesia

Adam Yogatama<sup>a,1</sup>, Nasiwan<sup>b,2</sup>

<sup>1</sup> ([adamyogatama.2021@student.uny.ac.id](mailto:adamyogatama.2021@student.uny.ac.id)) Mahasiswa Departemen PKNH, Fishipol, UNY

<sup>2</sup> ([nasiwan@uny.ac.id](mailto:nasiwan@uny.ac.id)) Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Politik, UNY

<sup>a</sup> Mahasiswa (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

<sup>b</sup> Dosen (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas pelaksanaan program pendidikan politik yang dijalankan oleh Partai Hijau Indonesia dalam upaya memperkuat kewarganegaraan ekologis kadernya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan politik serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kasus. Subjek ditentukan secara purposive dengan lima narasumber, yaitu Ketua, Koordinator Bidang Ideologi dan Kader, serta kader Partai Hijau Indonesia. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi, dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik Partai Hijau Indonesia dilakukan secara bertahap dan berjenjang melalui program PHI 101, tahap ideologisasi, social leadership, dan political leadership. Faktor pendukungnya meliputi kurikulum yang terstruktur dan jejaring eksternal, sedangkan hambatannya adalah keterbatasan dana dan rendahnya partisipasi masyarakat akibat popularitas partai yang masih rendah.

## ABSTRACT

*This study discusses the implementation of political education programs run by the Indonesian Green Party in an effort to strengthen the ecological citizenship of its cadres. This study aims to determine the implementation of political education and identify its supporting and inhibiting factors. The approach used is qualitative with the type of case study. The subject was determined purposively with five speakers, namely the Chairman, the Coordinator for Ideology and Cadres, and the cadres of the Indonesian Green Party. Data collection techniques in the form of interviews and documentation were analyzed using the Miles and Huberman model. The results of the study show that the political education of the Indonesian Green Party is carried out gradually and in stages through the PHI 101 program, ideologizing, social leadership, and political leadership stages. The supporting factors include a structured curriculum and external networks, while the obstacles are limited funds and low public participation due to the party's low popularity.*

## Sejarah Artikel

Diterima : 15-07-2025

Disetujui : 20-07-2025

## Kata kunci:

Kewarganegaraan Ekologis, Partai Hijau Indonesia, Pendidikan Politik

## Keywords:

Ecological Citizenship, Political Education, Indonesian Green Party

## Pendahuluan

Permasalahan krisis ekologis merupakan salah satu tantangan utama umat manusia pada abad ke-21. Kerusakan lingkungan, perubahan iklim, deforestasi, dan pencemaran sumber daya alam tidak lagi dapat dilihat sebagai gejala alamiah, melainkan sebagai akibat dari sistem politik-ekonomi yang menempatkan eksploitasi alam sebagai bagian dari strategi pembangunan. Di Indonesia, persoalan ini menjadi semakin kompleks karena kerusakan lingkungan sering kali dilegitimasi melalui kebijakan negara yang berpihak pada kepentingan korporasi dan oligarki ekonomi. Praktik pengesahan undang-undang yang pro-industri ekstraktif seperti UU Minerba 2020 dan UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan bukanlah dampak tak disengaja, melainkan bagian dari keputusan politik yang sistemik (Agassi, Hendrawan, & Mubarak, 2023)

Penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi-politik yang terkonsentrasi mempersempit ruang partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan

(Muthmainnah, Mustansyir, & Tjahyadi, 2020). Di sisi lain, kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan dan maraknya konflik agraria yang belum terselesaikan mencerminkan lemahnya keberpihakan negara terhadap keadilan ekologis. Dalam situasi demikian, muncul pertanyaan penting: bagaimana transformasi gerakan lingkungan ke dalam arena politik formal dapat memperkuat upaya perlindungan lingkungan hidup? Jawaban atas pertanyaan ini mendorong kebutuhan akan hadirnya partai politik alternatif yang berbasis pada ideologi ekologis dan keberlanjutan.

Partai Hijau Indonesia (PHI) merupakan salah satu respon terhadap persoalan tersebut. Partai ini lahir dari jejaring aktivis lingkungan dan gerakan masyarakat sipil yang sebelumnya terlibat dalam organisasi seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Sarekat Hijau Indonesia, dan jaringan keadilan iklim. PHI mengusung ideologi politik hijau yang menempatkan keadilan sosial dan ekologis sebagai prinsip dasar perjuangan politik. Tujuan utama PHI adalah mewujudkan Indonesia yang “Bersih, Adil, dan Lestari” – yaitu bebas dari korupsi dan kerusakan lingkungan, adil dalam hukum dan distribusi ekonomi, serta menjamin keberlanjutan hidup antar-generasi. Dalam konteks inilah PHI bukan hanya berfungsi sebagai alat politik elektoral, tetapi juga sebagai instrumen transformasi kesadaran dan praksis sosial warga negara.

Secara teoretis, politik hijau merupakan titik temu antara gerakan lingkungan dan arena politik formal. Dobson (2007) menjelaskan bahwa politik hijau adalah bentuk perjuangan politik yang menuntut agar pemenuhan kebutuhan manusia berjalan selaras dengan pelestarian lingkungan hidup, dengan mengedepankan keadilan ekologis, demokrasi partisipatoris, dan keberlanjutan. Senada dengan itu, Apriwan (2011) menyatakan bahwa politik hijau adalah gagasan bahwa manusia merupakan bagian dari alam (*natural beings*), bukan penguasa atasnya. Oleh karena itu, politik hijau tidak hanya berurusan dengan peraturan lingkungan, tetapi juga menantang dominasi kapitalisme dalam memaknai dan mengeksploitasi alam.

Keterkaitan antara politik hijau dan konsep kewarganegaraan ekologis menjadi penting untuk ditelaah lebih dalam. Kewarganegaraan ekologis merujuk pada pemahaman bahwa warga negara memiliki tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan, bukan hanya sebagai hak, tetapi juga sebagai bentuk etika dan kewajiban terhadap makhluk hidup lain (Godrej dalam Nugroho, 2021, hlm. 16). Konsep ini memperluas pemaknaan kewarganegaraan dari sekadar hubungan antara negara dan individu menjadi relasi antara manusia dan ekosistem. Dobson (2003) bahkan menyebut bahwa kewarganegaraan ekologis memiliki potensi untuk mewujudkan keadilan global karena menuntut perubahan struktur produksi dan konsumsi demi keberlangsungan planet.

Dalam kerangka ini, PHI memegang peran strategis, yakni sebagai pengarusutamaan nilai-nilai ekologis ke dalam sistem politik formal melalui kaderisasi dan pendidikan politik. Pendidikan politik bukan hanya berfungsi sebagai media sosialisasi nilai partai, tetapi juga sebagai proses ideologisasi dan pembentukan kesadaran ekologis yang berakar pada pengalaman kolektif dan analisis struktural. Pendidikan politik menjadi jalan untuk membangun pemahaman bahwa perjuangan lingkungan tidak bisa dilepaskan dari perjuangan sosial dan politik, serta pentingnya menjadikan partai sebagai alat perubahan yang sah dan demokratis.

Namun demikian, terdapat kesenjangan dalam kajian akademik terkait peran partai politik dalam membentuk kewarganegaraan ekologis, khususnya dalam konteks partai hijau di Indonesia. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung fokus pada peran partai politik dalam demokratisasi, konsolidasi partai besar, atau pendidikan politik yang bersifat umum (Zainenci, 2024; Tanya et al., 2022). Sementara itu, studi mengenai pendidikan politik partai alternatif yang berbasis pada ideologi lingkungan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penting untuk mengangkat pengalaman Partai Hijau Indonesia sebagai studi kasus yang dapat memberikan kontribusi empiris dan teoritis terhadap wacana politik hijau dan kewarganegaraan ekologis.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, dan menganalisis bagaimana program pendidikan politik PHI berkontribusi dalam membentuk kader-kader yang memiliki kesadaran ekologis yang kuat dan mampu mengartikulasikannya dalam praktik politik. Hal ini menjadi semakin penting mengingat PHI belum memiliki akses terhadap panggung politik elektoral nasional karena belum memenuhi syarat administratif sesuai UU No. 7 Tahun 2023 (Pasal 173). Dalam kondisi demikian, pendidikan politik menjadi satu-satunya alat yang paling strategis untuk memperluas basis ideologi dan mengembangkan struktur kader yang militan, partisipatif, dan progresif.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana program pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Hijau Indonesia membentuk kesadaran kewarganegaraan ekologis pada kadernya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pendidikan politik yang diterapkan, menilai efektivitasnya dalam membangun kesadaran ekologis dan kapasitas politik kader, serta mengungkap faktor pendukung dan penghambat dalam proses tersebut. Dengan mengkaji hal ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pendidikan politik yang relevan dengan kebutuhan gerakan sosial-ekologis di Indonesia.

Artikel ini bertumpu pada asumsi bahwa pendidikan politik yang berbasis ideologi hijau bukan hanya soal penguasaan wacana, melainkan juga merupakan proses transformatif yang membentuk cara berpikir, bertindak, dan berjejaring dalam memperjuangkan keadilan ekologis. Oleh karena itu, Partai Hijau Indonesia sebagai institusi politik alternatif perlu dilihat bukan semata sebagai partai yang belum masuk parlemen, tetapi sebagai laboratorium politik yang menawarkan cara baru dalam memaknai politik, kekuasaan, dan kewarganegaraan.

## Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Hijau Indonesia dalam membentuk kewarganegaraan ekologis kadernya. Penelitian dilakukan di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Januari–April 2025, dengan subjek penelitian dipilih melalui teknik purposive sampling yang meliputi Presidium Nasional, Pokja, serta kader dan peserta pendidikan politik Partai Hijau Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan teknik cross check antara hasil wawancara dan dokumentasi untuk memastikan validitas informasi yang diperoleh.

## Hasil dan Pembahasan

Partai politik memegang peran sentral dalam sistem demokrasi modern, tidak hanya sebagai instrumen perebutan kekuasaan, tetapi juga sebagai media artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat. Dalam konteks krisis ekologis global dan nasional, munculnya partai-partai berbasis lingkungan menunjukkan dinamika baru dalam lanskap politik kontemporer. Di Indonesia, kelahiran Partai Hijau Indonesia (PHI) merupakan wujud konkret dari transformasi gerakan lingkungan menjadi kekuatan politik formal.

PHI lahir dari akar gerakan lingkungan hidup yang dipelopori oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Kesadaran kolektif di kalangan aktivis bahwa perjuangan advokasi lingkungan tidak cukup bila hanya mengandalkan jalur sosial-kultural mendorong terbentuknya sebuah saluran politik alternatif. Tujuan utamanya ialah membawa isu-isu ekologi ke dalam arena pengambilan kebijakan negara, di mana keputusan strategis yang menyangkut keberlanjutan lingkungan diputuskan. Seperti dikemukakan oleh Jackson (2011), partai hijau pada umumnya berakar dari gerakan akar rumput yang muncul sebagai respons terhadap praktik destruktif pemerintah dan

industri terhadap lingkungan. Dobson (2007) juga menegaskan bahwa partai hijau adalah partai yang menjadikan paradigma hijau sebagai prinsip utama perjuangan politiknya.

Sebagai partai politik, PHI berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan ekologis, demokrasi akar rumput, dan keberlanjutan hidup. Visi partai ini terangkum dalam tiga nilai utama: Bersih, Adil, dan Lestari. "Bersih" berarti bebas dari korupsi dan eksploitasi lingkungan; "Adil" menunjukkan komitmen terhadap keadilan sosial dan hukum; dan "Lestari" menekankan keberlanjutan hidup antar-generasi. Sejalan dengan definisi partai politik yang dikemukakan oleh Friedrich (dalam Budiardjo, 2008, hlm. 403) dan Sigmund Neuman (dalam Surbakti, 2010, hlm. 148), PHI juga merupakan kelompok terorganisir yang bertujuan untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan pemerintahan demi mewujudkan agenda ideologisnya.

Secara legal-formal, tujuan partai politik diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang membaginya menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum berkaitan dengan tanggung jawab terhadap kepentingan nasional, sementara tujuan khusus terkait orientasi ideologis dan strategi masing-masing partai untuk merebut kekuasaan. PHI menyelaraskan diri dengan dua level tujuan ini: sebagai pengemban kepentingan ekologis nasional dan sebagai alat politik untuk mendorong transisi ke arah pembangunan yang berkelanjutan.

Keberadaan PHI juga berfungsi sebagai wadah artikulasi aspirasi warga yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu lingkungan hidup, sekaligus menjadi kanal partisipatif bagi mereka yang ingin terlibat aktif dalam politik hijau. Dalam menjalankan fungsinya, PHI merepresentasikan seluruh dimensi fungsi partai politik sebagaimana dikemukakan oleh Cholisin dan Nasiwan (2012, hlm. 112–113), yakni sebagai institusi representatif, agregator kepentingan, fasilitator integrasi politik, penyelenggara sosialisasi dan mobilisasi politik, serta pelaku seleksi dan rekrutmen kepemimpinan.

Di antara fungsi strategis partai politik yang krusial adalah penyelenggaraan pendidikan politik. Pendidikan politik berfungsi membentuk warga negara yang sadar hak dan kewajibannya serta mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, PHI berupaya membentuk kader-kader yang tidak hanya memiliki kesadaran ekologis, tetapi juga kapabilitas politik untuk memengaruhi arah kebijakan. Kartaprawira (2004, hlm. 34) menyatakan bahwa pendidikan politik merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka mampu berpartisipasi secara efektif dalam sistem politik. Fokus artikel ini adalah pada bagaimana Partai Hijau Indonesia menyelenggarakan pendidikan politik bagi kadernya sebagai bagian dari strategi perjuangan politik ekologis di Indonesia.

#### 1. Peran Partai Hijau Indonesia Dalam Membentuk Kewarganegaraan Ekologis Kader Melalui Pendidikan Politik

Partai Hijau Indonesia (PHI) merupakan manifestasi politik dari gerakan hijau yang menempatkan isu keadilan ekologis sebagai inti perjuangan politik. Dengan visi "Bersih, Adil, dan Lestari", PHI tidak hanya menargetkan perbaikan sistem pemerintahan yang bebas korupsi dan eksploitatif, tetapi juga memperjuangkan keberlanjutan lingkungan hidup sebagai prinsip utama dalam pengelolaan negara. Hal ini sejalan dengan gagasan Dobson (2007) bahwa politik hijau merupakan upaya menyelaraskan pemenuhan kebutuhan manusia dengan keberlangsungan ekologis melalui prinsip keadilan lingkungan dan demokrasi partisipatoris.

Politik hijau dalam pandangan PHI tidak berdiri terpisah dari kesadaran ekologis individual maupun kolektif. Sebaliknya, ia menjadi fondasi ideologis bagi pembangunan kewarganegaraan ekologis, yakni kesadaran warga negara untuk berperan aktif dalam menjaga, melestarikan, dan memperjuangkan keadilan ekologis. Kewarganegaraan ekologis, sebagaimana dijelaskan oleh Godrej dalam Nugroho (2021), menekankan peran

warga dalam memikul tanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam demi tercapainya keseimbangan antara manusia dan ekosistem.

Dalam konteks inilah PHI memposisikan pendidikan politik bukan semata sebagai alat sosialisasi nilai partai, melainkan sebagai sarana pembentukan kesadaran ekologis kader secara sistematis. Melalui program pendidikan politik yang terstruktur mulai dari PHI 101 hingga *Social Leadership*, PHI menanamkan prinsip-prinsip ekososialisme, demokrasi partisipatif, serta kepemimpinan kolektif yang berbasis pada nilai keberlanjutan. Pendidikan politik ini juga memfasilitasi proses internalisasi nilai dan transformasi kesadaran kader untuk berperan aktif dalam perjuangan sosial-ekologis baik di tingkat komunitas maupun dalam struktur formal politik.

a. PHI 101: Pendidikan Politik Dasar

Program PHI 101 merupakan tahap awal dan wajib bagi seluruh calon anggota. Materi yang disampaikan mencakup sejarah partai, ideologi, arah perjuangan, dan krisis iklim sebagai isu struktural. Peserta diperkenalkan pada pandangan PHI bahwa krisis ekologis berakar pada sistem kapitalisme dan disikapi melalui perspektif ekososialisme. Kegiatan ini juga menjadi ruang untuk mengenali potensi diri dan kontribusi individu dalam gerakan politik hijau.

b. Pendidikan Politik Tahap 1: Ideologisasi

Pendidikan Tahap 1 ditujukan bagi kader yang telah mengikuti PHI 101, dengan fokus pada pendalaman ideologi Hijau dan implementasinya di lapangan. Materi meliputi sejarah dan pemikiran ekososialisme, demokrasi ekonomi, serta riset perampasan lingkungan. Pendidikan ini dilaksanakan langsung di wilayah-wilayah terdampak krisis ekologis seperti Tambakrejo (Semarang), guna mengontekstualisasikan pembelajaran. Peserta juga dibekali keterampilan strategis seperti perumusan program politik dan pendekatan partisipatif terhadap masyarakat.

c. Pendidikan Politik Tahap 2: *Social Leadership*

Tahap ini diperuntukkan bagi kader yang akan atau sedang menjabat dalam struktur organisasi partai. Fokus utamanya adalah penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola organisasi yang demokratis dan akuntabel. Materi yang diajarkan mencakup penyusunan rencana strategis, pengambilan keputusan kolektif, manajemen keuangan partai, serta metode pengorganisasian berbasis jejaring.

d. Pendidikan Politik Tahap 3: *Political Leadership*

Merupakan tahap akhir yang diproyeksikan bagi kader yang akan maju dalam kontestasi elektoral. Materi pendidikan menekankan pembentukan kepemimpinan politik yang beretika, berpihak pada keadilan sosial dan ekologis. Namun hingga saat penelitian dilakukan, tahap ini belum dilaksanakan karena PHI belum memenuhi syarat administratif untuk mengikuti pemilu secara resmi.

Di luar jalur kaderisasi formal, PHI juga menyelenggarakan Sekolah PHI sebagai platform pendidikan politik partisipatif berbasis komunitas. Program ini bertujuan mendemokratisasi pengetahuan dengan prinsip bahwa setiap individu memiliki pengalaman yang layak dibagikan. Kegiatan yang dilakukan antara lain: Lokakarya Pengetahuan Lokal dan Lingkungan, yang mengangkat tradisi ekologis lokal seperti Ngertakeun Bumi Lamba; Piknik Perempuan, ruang aman untuk diskusi isu marginalisasi perempuan; Zine Club, pelatihan

media alternatif berbasis pengalaman lingkungan; Strategi Komunikasi Publik, pelatihan kampanye ekologis yang efektif; Bisnis 101, pembelajaran kewirausahaan hijau untuk individu dan organisasi. Secara keseluruhan, model pendidikan politik PHI tidak hanya berfungsi untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga sebagai alat transformasi sosial. Kegiatan tersebut berkontribusi dalam membentuk kader yang tidak hanya memahami teori ideologi Hijau dan krisis ekologi, tetapi juga memiliki kemampuan analitis, praksis, serta komitmen kolektif untuk mengartikulasikan perjuangan ekologis dalam arena politik formal.

Upaya yang dilakukan Partai Hijau Indonesia yaitu dengan program kaderisasi sekaligus pendidikan politik. Kaderisasi atau rekrutment politik yang Partai Hijau Indonesia lakukan tidak hanya sebagai formalitas untuk memenuhi administrasi saja, namun juga memperhatikan kualitas kader yang hendak dibentuk oleh Partai Hijau Indonesia sesuai dengan nilai, dan pedoman yang dianut. Sehingga akan tercipta kader yang memiliki kualitas baik, yang kemudian dapat dipercaya baik bagi partai maupun kepentingan nasional. Seperti pendapat Budiarto (2008, pp. 405-409) bahwa salah satu fungsi partai politik menciptakan pemimpin baru, baik itu untuk internal partai dan juga kepemimpinan nasional. Dalam ranah internal, partai politik membutuhkan kader yang berkualitas untuk mengembangkan diri. Kader suatu partai berkualitas, maka akan dapat mengajukan calon ke bursa pemilihan umum yang nantinya juga akan bermanfaat bagi kepentingan nasional.

Kualitas kader yang dimaksudkan adalah individu atau kader yang memiliki pengetahuan dan pemahaman, serta kesadaran terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik ideal yang ingin diwujudkan.. Ini sejalan dengan tujuan pendidikan politik menurut Nasirwan (2023, p. 12) menjelaskan bahwa pendidikan politik bertujuan untuk membebaskan individu dari pandangan sempit atau keterbatasan pikiran mengenai hal-hal yang dianggap tabu di bidang politik. Tujuannya agar tiap individu mampu untuk membuat pilihan mendasar tentang bagaimana mereka ingin menjalani hidup dan menentukan cita-cita politik mereka sebagai individu yang mandiri, dengan kemampuan berpikir kritisnya.

Partai Hijau Indonesia menyusun program pendidikan politik dengan sangat sistematis, terstruktur, dan keberlanjutan. Dimulai dari pendidikan dasar, hingga pendidikan lanjut bagi kader yang hendak mencalonkan diri melalui Partai Hijau Indonesia. Metode yang digunakan dalam pendidikan politik Partai Hijau Indonesia mengajak para kader dan calon kader untuk merefleksikan berbagai pikiran kritisnya mengenai kondisi negara hari ini. Sejalan dengan pendapat Nasirullah dan Amril dalam Nasirwan (2023:14) menjabar mengenai fungsi dan tujuan pendidikan politik sebagai berikut:

- 1) Mendorong baik generasi muda maupun orang dewasa untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab, khususnya dalam peran sosial dan politik. Hal ini mencakup pengembangan sikap seperti kerja sama, toleransi, loyalitas, sportivitas, dan nilai-nilai lainnya yang menunjang kesejahteraan bersama.
- 2) Menanamkan kesadaran politik, etika dalam berpolitik, serta rasa tanggung jawab dalam berpolitik, dengan tujuan membentuk individu yang berperilaku terpuji dalam dunia politik—yakni tidak mengedepankan kepentingan pribadi atau tindakan yang tidak etis.
- 3) Menumbuhkan wawasan kritis dan kesadaran terhadap hubungan kekuasaan dan politik di lingkungan sekitarnya. Hal ini berarti memahami bahwa hubungan sosial dan

struktur masyarakat bersifat dinamis dan senantiasa dapat diubah melalui keterlibatan dalam proses politik.

- 4) Memiliki kemampuan untuk memahami dan menganalisis konflik yang terjadi dalam kehidupan sosial-politik, serta terlibat secara aktif dalam upaya penyelesaiannya, mengingat bahwa isu-isu politik berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, baik secara positif maupun negatif.
- 5) Berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dengan memberikan gagasan atau masukan yang membangun mengenai persoalan sosial dan politik, karena hal tersebut merupakan bagian dari hak demokratis setiap warga negara.

Ditinjau dari program pendidikan politik yang dilakukan Partai Hijau Indonesia telah berhasil untuk membentuk kewarganegaraan ekologis. Kader yang telah mengikuti pendidikan politik dapat menunjukkan kesadarannya terhadap isu lingkungan dan politik. Takahashi (2016:4) memandang bahwa kewarganegaraan ekologis sebagai bentuk keterlibatan warga negara yang bertujuan untuk mendukung isu lingkungan. Kader mampu menganalisis secara kritis terhadap kebijakan publik, proyek pembangunan, dan peran negara dalam krisis ekologis. Hal ini dapat terlihat dari proses pendidikan politik ini ketika Kader mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari gerakan Hijau global yang memperjuangkan bumi, demokrasi, dan keadilan sosial. Hal ini sesuai dengan pengembangan gerakan kewarganegaraan ekologis kedalam empat tahapan yakni:

- 1) Environmental Knowledge yang diartikan sebagai ekspresi dari pengalaman dan pengetahuan seseorang berkaitan dengan alam yang memiliki tujuannya untuk menciptakan dan melakukan perbaikan dan menjaga kelestarian lingkungan secara individu maupun kolektif. Hal ini terlihat didalam pendidikan politik dasar atau PHI 101 yang dilakukan oleh Partai Hijau Indonesia. Dalam materinya memuat berbagai pengetahuan dasar mengenai isu lingkungan, seperti kerusakan akibat dari kapitalisme, isu kebijakan yang berpengaruh terhadap lingkungan, dan pengetahuan umum lainnya.
  - 2) Environmental Skill dimaksudkan sebagai keterampilan warga negara dalam mengidentifikasi, mengantisipasi, mencegah, dan mengatasi permasalahan lingkungan. Dalam pendidikan politik tahap 1 ideologisasi dengan materi mengenai ideologi ekososialisme, para kader diberikan materi untuk berfikir kritis mengenai solusi dari permasalahan lingkungan menggunakan sudut pandang sebagai kader partai.
  - 3) Environmental Attitudes adalah kumpulan nilai yang dianggap baik terhadap lingkungan, dan juga motivasi untuk berperan aktif dalam pengembangan ekologis dan pencegahan rusaknya.
  - 4) Environmental Participation adalah partisipasi warga negara yang memiliki sensitivitas atas persoalan lingkungan melalui tindakannya. Ini tercermin pasca pendidikan politik. Karena pendidikan politik yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan kader yang aktif dalam isu lingkungan melalui partai politik.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Partai Hijau Indonesia Dalam Memperkuat Kewarganegaraan Ekologis Kader Partai

Aspek yang penting dalam melakukan pendidikan politik ialah kurikulum pendidikan politik itu sendiri. Kurikulum yang dibuat oleh Partai Hijau Indonesia telah mengintegrasikan

secara sistematis nilai-nilai ekologis dalam konteks politik dengan pendekatan kritis yang mendorong peserta untuk merefleksikan relasi antara manusia, negara, dan lingkungan hidup. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, kurikulum ini dinilai telah mampu menjadi fondasi awal yang kuat dalam proses pendidikan politik, Wahyu Aji sebagai salah satu peserta pendidikan politik yang dilakukan Partai Hijau Indonesia mengafirmasi bahwa penggunaan metode dan kurikulum dalam pendidikan politik ini cukup baik.

Rata-rata kader Partai Hijau Indonesia memiliki latar belakang aktivisme atau pengalaman dalam gerakan sosial berbasis lingkungan. Artinya, kader telah memiliki komitemen mengenai nilai dan ideologi yang hendak dibawa oleh partai. Hal ini menjadi modal dalam melakukan pendidikan politik. Nilai-nilai ekologis yang hendak dijarakan dalam pendidikan politik akan lebih mudah diinternalisasi dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam aktivitas politik mereka.

Dukungan dari pihak eksternal juga menjadi faktor pendukung dari pendidikan politik ini. Partai Hijau Indonesia memiliki berbagai jaringan di komunitas atau organisasi sipil lainnya. Tak jarang pemateri pendidikan politik yang dilakukan berasal dari jaringan tersebut. Selain itu, jaringan ini mendukung dalam bentuk fasilitas pelatihan, maupun materi pendukung, menjadi elemen penting dalam menjaga kualitas proses pendidikan, meskipun dilaksanakan dalam keterbatasan sumber daya.

Partai Hijau Indonesia masih mencoba berbagai cara yang akan dilakukan untuk eksis dalam dunia politik di Indonesia. Sebagai partai baru, tentu masih dihadapkan dengan berbagai kendala dalam melakukan pendidikan politiknya. Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan pendidikan politik adalah keterbatasan pendanaan. Hingga saat ini, Partai Hijau Indonesia masih bergantung pada iuran anggota sebagai sumber pendanaan utama. Hal ini menyebabkan ruang gerak program menjadi terbatas, terutama dalam hal logistik, transportasi, dan pengadaan fasilitas pelatihan.

Ada beberapa program pendidikan politik yang dirancang terbuka bagi masyarakat luas. Namun, dalam pelaksanaannya belum mampu menjangkau masyarakat secara menyeluruh. Keterbatasan aksesibilitas waktu, tempat, dan metode pelaksanaan juga menjadi hambatan yang menyebabkan partisipasi dari warga non-kader masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan teknis yang digunakan masih perlu dievaluasi kembali, terutama untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat di wilayah pelaksanaan.

Hal ini sesuai dengan pemaparan Kartono mengenai hambatan yang sering terjadi dalam pendidikan politik, sebagai berikut:

- 1) Sikap apatis dan sinis terhadap politik, yaitu rasa putus asa yang membuat masyarakat menjadi tidak percaya terhadap upaya edukasi maupun gerakan politik, karena mereka meyakini bahwa semua hal tersebut hanyalah bentuk kepalsuan.
- 2) Rendahnya tingkat pendidikan menjadi penghambat bagi masyarakat dalam memahami dinamika dan situasi politik yang terjadi.
- 3) Kepemimpinan yang bersifat otoriter tidak menginginkan adanya partisipasi maupun pengawasan dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.
- 4) Kesulitan dalam membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai kondisi mereka sendiri yang penuh penderitaan dan kemiskinan, akibat terlalu lama hidup dalam penindasan.



## Simpulan

Partai Hijau Indonesia hadir sebagai respons atas keterbatasan gerakan lingkungan dalam menembus arena politik formal, sekaligus sebagai manifestasi dari politik hijau yang mengintegrasikan isu-isu keadilan sosial, keberlanjutan ekologi, dan demokrasi partisipatoris ke dalam sistem politik Indonesia. Berbeda dari partai-partai konvensional, Partai Hijau Indonesia tidak hanya bertujuan merebut kekuasaan, tetapi juga berkomitmen untuk membentuk kader yang memiliki kesadaran ekologis tinggi melalui jalur pendidikan politik yang terstruktur, sistematis, dan berorientasi pada ideologi hijau. Penelitian ini menemukan bahwa peran Partai Hijau Indonesia dalam membentuk kewarganegaraan ekologis kadernya dijalankan melalui program pendidikan politik yang progresif, terdiri dari beberapa tahapan mulai dari pendidikan dasar (PHI 101) hingga pelatihan lanjutan bagi kader yang hendak maju dalam kontestasi politik. Pendidikan ini tidak hanya mentransmisikan ideologi partai, tetapi juga memuat muatan kritis terkait pengetahuan lingkungan (environmental knowledge), keterampilan dalam menangani persoalan ekologis (environmental skill), pembentukan sikap ekologis (environmental attitude), hingga partisipasi aktif dalam gerakan lingkungan (environmental participation). Pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Hijau Indonesia berfungsi ganda: sebagai alat ideologisasi kader dan sebagai sarana pembentukan identitas kewarganegaraan ekologis yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya terhadap alam dan masyarakat. Melalui proses ini, kader dilatih untuk menjadi pemimpin yang tidak hanya memiliki orientasi politik, tetapi juga keberpihakan terhadap isu-isu lingkungan hidup sebagai bagian dari perjuangan demokratis dan keadilan sosial. Dengan pendekatan ini, Partai Hijau Indonesia menunjukkan komitmennya untuk membangun budaya politik baru yang tidak eksploitatif, melainkan transformatif dan ekologis.

## Referensi

- Agassi, M. A., Hendrawan, R., & Mubarak, A. A. (2023). Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11), 397-412. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10282684>.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cholisin., & Nasiwan. (2012). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Penerbit Ombak: Yogyakarta.
- Dobson, A. (2003). *Citizenship and the Environment*. Oxford: Oxford University Press.
- Dobson, A. (2007). *Green political thought*. Routledge.
- Kantaprawira, R. (2004). *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinarbaru Algensindo.
- Muthmainnah, L., Mustansyir, R., & Tjahyadi, S. (2020). Kapitalisme, Krisis Ekologi, dan Keadilan Intergenerasi: Analisis Kritis atas Problem Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Mozaik Humaniora*, 20(1), 57-69. <https://doi.org/10.20473/mozaik.v20i1.15754>.
- Nasiwan. (2023). *Pendidikan Politik Transformatif: Kado Satu Abad Kemerdekaan Indonesia (Cetakan pertama)*. Yogyakarta: UNY Press.
- Nugroho, D. A. (2021). *Ecological Citizenship:(Kewarganegaraan Ekologis): dalam Perspektif Teori dan Riset*. Amerta Media.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik Cetakan Ketujuh*. Jakarta: PT Grasindo.
- Tantya, R. A., Abubakar, M. B., Arahman, D., & Zulhildi, Z. (2022). Implementasi Fungsi Partai Politik (Studi Kasus Peran Partai Golkar Dalam Memberikan Pendidikan Politik terhadap Masyarakat di Bener Meriah Tahun 2019-2020). *JPP Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 7(1), 1-25. <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jpp/article/view/9087>.

Zainenci, R. M. (2024). Pelaksanaan Fungsi Partai Politik sebagai Sarana Pendidikan Politik Masyarakat di Kabupaten Purworejo (Studi Pendidikan Politik DPC PDI Perjuangan Purworejo). UNS Repository. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/112549/>.